

Upaya Penculikan Bayi di Lampung Gagal, Warga Teriaki Pelaku Saat Gendong Korban

LAMPUNG (IM)- Dugaan upaya penculikan bayi di Bandar Lampung gagal setelah pelaku diteriaki warga setempat. Pelaku sempat menggendong korban saat diteriaki.

Peristiwa upaya penculikan tersebut terjadi di Jalan Teluk Ambon, Gang Rajawali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang pada Selasa (31/1) sekitar pukul 14.00 WIB. Korban berinisial IY yang masih berusia 1 tahun.

Tetangga korban, Oktaviana (34) mengatakan upaya penculikan itu dipergokinya saat dia sedang duduk di teras rumahnya. Menurutnya ketika itu IY sedang bermain di depan rumah, lalu datang seorang perempuan berumur dan mendekati korban. "Kita enggak curiga (mau diculik), soalnya ibu itu ngajak ngobrol (korban)," kata Oktaviana ditemui di lokasi, Rabu (1/2) siang. Ciri-ciri pelaku yaitu berperawakan tua sekitar 50 tahun,

mengenakan daster dan berambut acak-acakan. "Bukan orang sini, dia (pelaku) juga sendirian," kata Oktaviana.

Oktaviana mengaku seperti mengalami hipnotis saat pelaku memegang korban dan baru tersadar ketika korban sudah digendong pelaku.

Sontak Oktaviana bertekad dan menyebut IY adalah anak tetangganya. Mendengar teriakan itu pelaku langsung menurunkan korban dan melarikan diri masuk gang kecil.

Sementara itu, ibu korban bernama Dede (35) mengaku baru mengetahui peristiwa itu setelah pulang dari warung. Menurutnya, ketika itu Dede sedang belanja ke warung yang dekat dari rumah. Sedangkan korban sedang bermain bersama sang kakak dan tetangga. "Saya tahu dari tetangga katanya udah digendong," kata Dede. ● **pra**

Sampah Kotori Dermaga Teluk Pandeglang, Pemerintah Didesak Bangun TPS

PANDEGLANG (IM)- Dermaga Teluk di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang dipenuhi sampah. Kondisi tersebut pun cukup mengganggu kenyamanan warga dan dapat mencemari laut. Pantauan di lapangan, sampah dengan berbagai jenis menumpuk dan berserakan di sepanjang bangunan dermaga. Bahkan sampah itu pun banyak yang jatuh ke laut dan terbawa arus laut ke tengah.

Kondisi penumpukan sampah di dermaga Teluk tersebut bukan pertama kali terjadi, tapi kondisi itu sudah berlangsung lama namun belum ada pihak yang menangani secara serius masalah sampah itu. "Sampah-sampah itu selain mengganggu kenyamanan juga dapat mencemari laut. Harusnya cepat ditangani baik oleh pihak desa maupun pihak terkait lainnya," ungkap salah seorang warga Labuan, Suherman, kemarin.

Herman mengaku, tidak mengetahui sumber sampah tersebut dari mana, mungkin sengaja dibuang oh warga atau

kiriman dari mana. Namun yang jelas, harus segera ada penanganan jangan sampai berserakan di dermaga. "Harusnya di sekitaran dermaga ada TPS supaya sampah tidak dibuang ke laut. Pada akhirnya sekarang sampah menumpuk di dermaga dan bisa mencemari laut," katanya.

Herman berharap, pihak desa setempat juga harusnya jangan tutup mata dengan kondisi sampah yang menutup dermaga. Paling tidak harus ada upaya bagaimana agar sampah itu bersih dan tidak lagi ada warga yang membuang sampah ke laut. "Kami harap pihak desa melakukan penanganan terhadap kondisi sampah itu. Jangan sampai menumpuk dan berserakan di dermaga itu," harapnya.

Menurutnya, sampah yang menumpuk dan berserakan di dermaga tersebut tepat di depan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Teluk. Akibat banyaknya sampah yang sudah menimbulkan bau busuk itu, mengganggu terhadap kenyamanan pengunjung TPI. ● **pra**



IDN/ANTARA

HARGA GABAH KERING NAIK

Petani merontokkan padi saat musim panen di Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (1/2). Harga gabah kering di tingkat petani mengalami kenaikan dari Rp500 ribu menjadi Rp 620.000 per kuintal akibat dua kali musim panen mengalami kegagalan yang disebabkan hama wereng dan tikus.

Pelayanan Puskesmas di Pandeglang Tak Maksimal, Warga dan Kades Ancam Demo

Belum apa-apa pasien sudah dimintai biaya. Alasannya biaya itu untuk rujukan dan tes swab, itu yang menjadi keluhan kami atas pelayanan di Puskesmas Cisata, ungkapny Kades Ciherang Jaya, Saedih. Padahal pasien yang dibawanya ke rumah sakit memiliki BPJS mandiri, tapi masih saja dimintai biaya, ujarnya.

PANDEGLANG (IM)- Kepala Desa Ciherang Jaya dan masyarakatnya, mengeluhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Cisata, Kabu-

paten Pandeglang yang dinilai kurang optimal.

Salah satu pelayanan yang menjadi keluhan tersebut, yaitu pasien rujukan lantaran

belum apa-apa sudah diminta biaya oleh pihak Puskesmas tersebut.

Atas keluhan pelayanan tersebut, Kades dan warganya bakal melakukan aksi demo ke Puskesmas Cisata, menuntut agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dimaksimalkan.

Kepala Desa Ciherang Jaya, Kecamatan Cisata, Saedih mengungkapkan, pihaknya sangat mengeluhkan dengan sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas Cisata tersebut.

Sebab menurut Kades, saat dirinya mengawal pasien yang merupakan warganya sendiri, ketika hendak dirujuk ke RSUD Berkah Pandeglang, diminta

biaya untuk rujukan dan tes swab. "Belum apa-apa pasien sudah diminta biaya. Alasannya biaya itu untuk rujukan dan tes swab, itu yang menjadi keluhan kami atas pelayanan di Puskesmas Cisata," ungkapny, Rabu (1/2).

Pada hari Selasa, Kades, pasien yang dibawanya tersebut memiliki BPJS mandiri, tapi masih saja di minta biaya saat di Puskesmas Cisata. "Pasien punya BPJS mandiri, tapi anehnya masih dipinta biaya untuk rujukan dan swab," katanya.

Atas tidak maksimalnya pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, pihaknya bersama warganya akan melaku-

kan aksi demo, guna menuntut agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Cisata lebih dioptimalkan lagi. "Kami akan demo ke Puskesmas Cisata, karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kami rasa tidak optimal. Pasien BPJS belum apa-apa sudah di minta biaya," tegasnya.

Sementara, Kepala Puskesmas Cisata, Nining Yuningsih saat dihubungi melalui sambungan telepon, belum bisa memberikan tanggapan apapun, soalnya ia mengaku sedang melakukan rapat.

"Nanti ya saya sedang rapat dulu, nanti telpon lagi," singkatnya. ● **pra**

DUA TAHUN TAK BAYAR PAJAK

1,2 Juta Kendaraan di Banten Terancam Diblokir

SERANG (IM)- Sebanyak 1,2 juta kendaraan di Provinsi Banten terancam diblokir atau dihapus nomor kendaraannya. Pemblokiran dilakukan karena kendaraan tersebut sudah tidak membayarkan pajak selama dua tahun. Aturan itu tertuang pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepala Bidang Pengendalian Sistem Informasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Bapenda Provinsi Banten, Ahmad Budiman mengatakan, dari 1,2 juta kendaraan didominasi oleh kendaraan roda dua atau motor. "Dari 1,2 juta itu, sekitar 400 ribuan kendaraan roda empat, dan selebihnya adalah kendaraan roda dua," ujar Budi-

man kepada wartawan, Rabu (1/2). Sejauh ini, Budiman masih berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Banten terkait rencana penghapusan kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Namun, pemblokiran kendaraan akan dilakukan secara bertahap dan akan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. "Mungkin akan dipilah dulu. Mana yang urgent

untuk dihapus. Misalnya yang sudah 20 tahun tidak membayarkan pajak (yang dihapuskan)," kata Budiman.

Sementara itu, Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan penerapan aturan yang berlandaskan hukum sesuai pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Namun, Firman belum bisa memastikan kapan kebijakan itu akan diterapkan di Banten karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. "Kalau tidak (bayar pajak), siap-siap kendaraannya akan menjadi bodong. Tapi saya mengimbau untuk segera dibayar pajaknya," kata Firman. ● **pra**

Pasokan Minyak Goreng Bersubsidi Sulit Ditemukan di Kota Tangerang

TANGERANG (IM)- Pasokan minyak goreng (migor) bersubsidi yakni minyak kita sulit ditemukan di Kota Tangerang. Kondisi itu menuai banyak keluhan dari para pedagang.

Nur Hasanah salah seorang pedagang sembako di Pasar Malabar Kota Tangerang mengatakan, kelangkaan migor bersubsidi tersebut terjadi sejak beberapa pekan terakhir. "Banyak sih pembeli yang tanya minyak tersebut. Sudah lama stoknya susah didapat, langka barangnya," ujarnya, Rabu (1/2).

Nur menduga, kelangkaan peredaran migor tersebut akibat adanya aksi borong dari para pedagang besar.

Terlebih harga migor tersebut per liternya sangat ekonomis dan banyak diburu konsumen yakni sebesar Rp14 ribu per liter.

"Saya saja sekarang seminggu hanya dapat beli satu karton yang isi satu liter itu pun belinya di swalayan besar," tambahnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisnansyah mengatakan, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang sudah melakukan koordinasi dengan Bulog.

"Sudah disampaikan nanti tinggal pihak Bulog yang mengkoordinir dengan para distributor supaya bisa disalurkan, kan kita juga punya tugas dari pak presiden untuk mengenda-

liken inflasi," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/2).

Arief berharap, pemerintah pusat dapat mengatasi kelangkaan tersebut. "Ya mudah-mudahan pemerintah pusat bisa dengan kelangkaan yang sekarang dirasakan, mudah-mudahan bisa responsif, menyuplai kebutuhan minyak goreng ini," tambahnya.

Pihaknya akan berupaya kembali menstabilkan harga migor bersubsidi salah satunya melalui bazar.

"Saya saja sekarang seminggu hanya dapat beli satu karton yang isi satu liter itu pun belinya di swalayan besar," tambahnya.

"Ya nanti kita stabilkan lagi, makanya yang terpenting sekarang kita minta supplainya ditambah dulu. Ini kan kondisinya berkaitan dengan hukum ekonomi suplay dan demand, karena jumlahnya terbatas harganya naik. Nanti kita koordinasikan, kita sedang berkoordinasi supaya barangnya ditambah supaya harga bisa stabil," pungkasnya.

Arief berharap, pemerintah pusat dapat mengatasi kelangkaan tersebut. "Ya mudah-mudahan pemerintah pusat bisa dengan kelangkaan yang sekarang dirasakan, mudah-mudahan bisa responsif, menyuplai kebutuhan minyak goreng ini," tambahnya.

Pihaknya akan berupaya kembali menstabilkan harga migor bersubsidi salah satunya melalui bazar. ● **pra**

Kasus Stunting di Kab. Tangerang Turun Hampir 100 Persen

TANGERANG (IM)- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang berada di posisi empat dari delapan Kabupaten/kota di Banten," tuturnya.

Menurut dia, dengan jumlah tersisa 9.200 kasus kekerdilan terhadap anak saat ini menunjukkan penanganan stunting yang dilakukan oleh kerjasama tim percepatan penurunan dari berbagai stakeholder membuahkan hasil cukup positif. "Dan ini hasil upaya kita bersama stakeholder terkait penekanan angka stunting, baik program-program dari Dinas Kesehatan maupun dari DPPKB," tuturnya.

Selanjutnya, kata Hendra, dengan hasil positif dari penekanan angka stunting tersebut, pihaknya akan terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting di tahun 2023 ini. Caranya, turun

ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan repitalisasi posyandu.

"Terutama dari Dinas Kesehatan akan melakukan pengobatan terhadap anak yang stunting, kemudian DPPKB melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada keluarga yang beresiko stunting secara door to door," ungkapnya.

Selain melakukan sosialisasi dan pengobatan dalam pencegahan itu, pihaknya juga ke depan akan bekerja sama dengan Dinas Perumahan setempat untuk melakukan pembangunan fasilitas jamban layak bagi keluarga kurang mampu di daerah itu. "Sementara sampai sekarang untuk wilayah Kabupaten Tangerang yang terdapat sebaran kasus stunting paling banyak yaitu di wilayah utara, di mana terdapat kurang lebih 300 kasus stunting di setiap kecamatan," pungkasnya. ● **pra**



IDN/ANTARA

PAMERAN KOMIK PERLAWANAN REMAH-REMAH

Pengunjung mengamati karya saat pameran komik "The Dagingtumbuh Vol.20" di Tempuran Space, Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (1/2). Pameran komik "The Dagingtumbuh vol.20" bertajuk Perlawanan Remah-Remah" yang diikuti 30 seniman tersebut sebagai gambaran semangat untuk bangkit dari pandemi COVID-19.



IDN/ANTARA

HARGA BERAS TERUS NAIK

Pedagang melayani pembelian beras di Pasar Balubur Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/2). Harga beras di sejumlah kota di Indonesia seperti Bandung dan Jakarta mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir dengan kisaran kenaikan dari Rp 500 hingga Rp 1.500 per kilogramnya untuk semua jenis beras yang diduga disebabkan gagal panen di sejumlah lumbung pasokan.

Bupati Lebak Minta RSUD dr Adjidarmo Rangkasbitung Tingkatkan Pelayanan

LEBAK (IM)- Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya meminta kepada jajaran manajemen dan seluruh karyawan RSUD dr Adjidarmo untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Iti menyebut bahwa rumah sakit berplat merah itu merupakan wajah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Untuk itu, dirinya meminta kepada direktur RSUD dr Adjidarmo Rangkasbitung yang baru saja dilantik yakni dr Budhi Mulyanto untuk melakukan banyak perbaikan guna peningkatan pelayanan di masyarakat.

"Dengan adanya jajaran manajemen yang baru ini, kita minta perombakan-perombakan baik di tataran manajemen terutama soal sarana prasarana di rumah sakit," kata Iti saat memberikan arahan kepada manajemen dan karyawan RSUD dr Adjidarmo Rangkasbitung di Aula Setda Lebak, Rabu (1/2).

Iti mengatakan, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi seperti sarana prasarana dan layanan pengobatan. Makanya, di tahun ini juga Pemkab Lebak

sudah mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi gedung RSUD dr Adjidarmo Rangkasbitung. "Jadi gedung yang lama ini kita rehabilitasi, kita bongkar, kita bangun untuk meningkatkan pelayanan itu sekarang ditumpuk di sana," kata Bupati.

Mantan anggota DPR RI ini mengingatkan RSUD dr Adjidarmo dapat berjalan sesuai motonya yaitu 'Cageur awakna, Bageur hatena, Bagia milikna'. "Saya ingin RSUD ini sesuai dengan moto nya, jadi misalkan pelayanan bisa optimal terus sarana prasarana baik maka akan memberikan kebahagiaan bagi pasien atau karyawan RSUD itu sendiri," tandasnya.

Mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya menambatkan selain memerhatikan pembenahan untuk pelayanan pasien, manajemen juga harus memikirkan tingkat kesejahteraan karyawan RSUD itu sendiri. "Seperti pemberian protein bagi perawat yang jaga malam, mereka asupan gizi nya harus diperhatikan. Jangan sampai malam jaga, besok pagi nya sakit" ● **pra**